

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah penduduknya padat. Secara spesifik, Provinsi Jawa Barat dengan luas 35.377 km² didiami penduduk sebanyak 46.183.642 jiwa (sensus penduduk 2013). Setiap tahunnya Jawa Barat mengalami kenaikan penduduk yang signifikan. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan kerja yang memadai. (Sumber : pusdalisbang.jabarprov.go.id)

“Indonesia adalah negara yang besar, namun sayang lapangan pekerjaannya kecil,” papar Ibu Ina Hagniningtyas selaku Direktur kerja sama Ekonomi ASEAN, kementerian luar negeri. Maka dari itu, untuk mengurangi pengangguran dan sebagai upaya memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, muncul sebuah program dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Jabar Mengembara. Jabar mengembara merupakan kegiatan yang di dalamnya terdapat pelatihan bagi pencari kerja ke luar Jawa Barat, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Diharapkan dengan Jabar mengembara, kualitas tenaga kerja dari Jawa Barat dapat semakin berharga, berwibawa, dan memiliki harga. (Sumber : Feru L, www.antarabogor.com)

Para Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja keluar negeri dikenal dengan singkatan TKI. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ochang dari BLTKLN (Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri) Jawa Barat, TKI sendiri dibedakan menjadi dua, yakni TKI formal dan TKI non-formal. Yang membedakan adalah TKI formal memiliki jam kerja yang terbatas (seperti misalnya pekerja pabrik, operator, perawat, dan lainnya), sedangkan TKI non-formal tidak memiliki waktu bekerja yang terbatas (seperti misalnya pekerja rumah tangga). Walaupun pemerintah Jawa Barat berupaya mengirimkan tenaga kerjanya keluar Jabar bahkan ke luar negeri, tetapi tetap ada dorongan dan larangan dari pemerintah pusat. Salah satu faktor pendorong adalah

kampanye Jabar Mengembara. Yang diadakan pemerintah daerah Jawa Barat. Sedangkan faktor penghalang atau larangannya dilansir dari www.tempo.com pada Jumat 13 Februari 2015, Presiden Joko Widodo sudah menargetkan akan memberhentikan penempatan pekerja rumah tangga (TKI non formal) ke luar negeri, atau dikenal dengan sebutan *moratorium*. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sedang berupaya meningkatkan jumlah TKI formal.

Tabel 1.1 Penempatan TKI dari Tahun 2011 Hingga 2014

No.	Tahun	Jumlah Penempatan TKI	TKI Formal	%	TKI Informal	%
1.	2011	586.802	266.191	45	320.611	55
2.	2012	494.609	258.411	52	236.198	48
3.	2013	512.168	285.297	56	226.871	44
4.	2014	429.872	247.610	58	182.262	42

Sumber: Subdit Pengolahan Data Puslitfo BNP2TKI 2014

TKI juga sering disebut sebagai pahlawan devisa negara, tetapi pada praktik lapangannya banyak dari TKI yang masih kurang dihargai. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Panji Setiadi dari BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Jawa Barat, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor dari dalam pekerja dan faktor dari luar pekerja. Faktor dari dalam, yakni: kurang keterampilan kerja, mental yang belum siap, gagap teknologi, kurangnya kemampuan berbahasa dan pengetahuan akan negara yang dituju, serta banyak faktor minor lainnya. Sedangkan faktor dari luar adalah tidak semua negara tujuan TKI sudah memiliki peraturan atau undang-undang khusus yang mengatur hak, kewajiban, dan sanksi untuk Tenaga Kerja Luar Negeri.

Kurangnya kemampuan bahasa menjadi sorotan bagi penulis. Sesuai dengan slogan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk TKI adalah, “jangan berangkat sebelum siap”. Keterbatasan bahasa bisa berakibat buruk bagi TKI itu sendiri. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Panji, banyak kekerasan yang dialami TKI berawal dari ketidakmampuan mereka untuk berbahasa. Bahkan ketika

TKI di negara bekerja mengalami masalah, mereka mungkin sulit berkomunikasi karena bahasa yang terbatas. Topik ini dipilih penulis karena kurangnya kesadaran dari TKI yang berangkat ke luar negeri mengenai kemampuan berbahasa. Dibutuhkan kampanye untuk mengubah pemikiran dan menekankan bahwa bahasa sangat penting untuk berkomunikasi di negara tujuan bekerja.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang ada, permasalahan yang menjadi sorotan penulis adalah:

- a. Bagaimana cara paling efektif untuk menyadarkan calon TKI bahwa kemampuan berbahasa sangat diperlukan?
- b. Bagaimana agar calon TKI mau melakukan tindakan untuk mengembangkan kemampuan berbahasanya?

Dengan permasalahan di atas, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

- a. Penulis hanya fokus pada TKI formal yang berdomisili di Jawa Barat.
- b. Bahasa yang menjadi sorotan pengembangan komunikasi adalah Bahasa Inggris, Mandarin, Korea, dan Jepang. (sesuai dengan standar Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri)

1.3 Tujuan Perancangan

Kurangnya kesadaran pentingnya berbahasa bisa jadi karena calon TKI belum tahu dampak negatif apabila tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kesadaran calon TKI adalah dengan kampanye. Dari segi biaya, pembelajaran bahasa bisa terbilang mahal, maka dari itu penulis ingin memberi solusi di setiap media dan tahapan kampanye apabila Pemerintah Jawa Barat memiliki sebuah Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri (BLTKLN) yang

dapat diikuti tanpa dipungut biaya. BLTKLN juga memberangkatkan calon TKI khusus formal ke-4 negara tujuan dengan basis *Government to Government*. G2G sendiri berarti pemerintah ke-4 negara tersebut meminta langsung kepada pemerintah Indonesia bahwa negara mereka membuka peluang bagi calon TKI formal untuk bekerja di negara mereka dengan pekerjaan tertentu. (Misalnya Pemerintah Jepang membuka lapangan pekerjaan untuk calon TKI sebagai *careworker* atau *nurse*) Ke-4 negara tersebut adalah Malaysia, Hongkong, Jepang, dan Korea.

1.4 Pengumpulan Data

- a. Wawancara dengan Bpk. Rd. Panji Satriadi P, S.E. MBA. dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
- b. Wawancara dengan Bpk. Ochang selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi dari Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri (BLTKLN)
- c. Studi Pustaka (Internet, buku, TV, dan koran)
- d. Observasi (lembaga pelatihan)

1.5 Skema Perancangan

